



Pemprov DKI Pilih RDF untuk Atasi Sampah

Pabrik *refused derived fuel* dinilai lebih terjangkau ketimbang *intermediate treatment facility*. DPRD DKI ingatkan Pemprov DKI tidak gegabah soal perubahan itu.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau *refused derived fuel* (RDF) daripada membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah atau *intermediate treatment facility* (ITF). Teknologi RDF dipilih karena biayanya dinilai lebih terjangkau.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI tetap membangun ITF lantaran sudah ada payung hukum. Keterbatasan biaya sesungguhnya dapat diatasi dengan mencari solusi terbaik bagi bersama.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah sampah harian berdasarkan data timbangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat. Rata-rata jumlah sampah masuk 7.228 ton per hari pada 2021 atau meningkat 27 persen dari rata-rata sampah masuk tahun 2015 sebesar 5.655 ton per hari.

"Bisa bangun ITF, tetapi anggaran tidak cukup untuk bayar biaya pengolahan sampah (*tipping fee*). Jadi, sementara masih kembangkan RDF yang tidak perlu biaya *tipping fee*," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (9/8/2023), di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup

DKI memperkirakan pembangunan pabrik RDF Bantargebang berkapasitas 2.000 ton per hari butuh biaya Rp 855 miliar. Adapun pembangunan ITF Sunter diperkirakan Rp 5,2 triliun dengan kapasitas pengolahan 2.200 ton per hari.

Pabrik RDF di Bantargebang menggunakan lahan seluas 7,5 hektar. Sampah yang diolah menjadi RDF mulai disalurkan sebagai bahan bakar dua pabrik semen, yakni PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk di Citeureup, Jawa Barat, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di Narogong, Jawa Barat.

Dari 2.000 ton sampah yang diolah per hari, sebanyak 1.000 ton di antaranya berasal dari tumpukan lama berusia sedikitnya enam tahun yang didapatkan lewat metode *landfill mining*. Sampah lama ini berasal dari zona tidak aktif Bantargebang.

Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam laman <https://upstdlh.id/itf/index> menjelaskan, ITF berdasarkan rencana induk pengelolaan sampah Jakarta 2012-2032 akan dibangun di Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi.

ITF dapat mereduksi sampah hingga 90 persen dari kapasitas totalnya. Pengolahan sampahnya melalui perubahan bentuk, komposisi, dan volume sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah tepat guna

dan ramah lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, finansial, dan sosial.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada kepastian dibangunnya ITF Sunter. Pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) terkait pembangunan ITF Sunter mandek meski sudah direncanakan sejak 2011 dan sudah dilakukan pemancangan tiang perdana pada 2018.

Konsekuensi hukum

Anggota Komisi B DPRD DKI, Taufik Zoelkifli, mengingatkan Pemprov DKI tidak gegabah mengganti ITF dengan RDF. Menurut dia, pembangunan ITF sudah dikaji bertahun-tahun dan ada payung hukum. "Kalau tiba-tiba mengganti ITF dengan RDF itu tidak prosedural. Menabrak banyak peraturan. DPRD DKI Jakarta bisa menggunakan hak angket untuk hal tersebut," ucap Taufik.

Taufik mengatakan, PMD Rp 577 miliar sudah diberikan pada Jakarta Propertindo. Artinya, secara hukum proyek ITF sudah harus dijalankan. Jika tidak, maka secara keuangan dan teknis akan merugikan negara dan hilangnya kepercayaan investor.

"Secara hukum akan terjadi tidak terlaksananya peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan calon mitra kerja sama kemungkinan besar akan melakukan gugatan," kata Taufik. (DAN)